

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publisng.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Retno Amalia. 2019. *Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang Dihubungkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

- , 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shant Dellyana. 2007. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soewadji. 2005. *Merubah Image Polisi*. Jambi: Pustaka Bintang, Cet I.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media Law & Policy Centrel.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap, M. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Adi Mansar, “Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, *Red Notice*, Cekal”, *Jurnal SANKSI Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Fakultas Hukum UMSU, 2022.
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Februari 2025.
- Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 18 September 2024.

- Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014.
- Harry Angga Sinaga, “Peningkatan Tindakan Dalam Pencarian Oknum Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi* Vol. 13 No. 2 Desember 2020
- Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26_citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASE3iqnhoufwC%26tzom%3D-420.
- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 18 September 2024.
- Mansar, Adi (2022-02-22). "Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal". Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (dalam bahasa Inggris). 1 (1): 90–98.
- Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T., dan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. 1–10. <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>.
- Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID->

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

----- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Internet

Anggara, “ICJR Desak Pemerintah Terbitkan PP Hukum Acara Praperadilan”, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt/icjr-desak-pemerintah-terbitkan-pp-hukum-acara-praperadilan>, diakses tanggal 02 Maret 2025.

Erwina Rachmi Puspapertiwi, Inten Esti Pratiwi, "Bolehkah Polisi Hapus 2 Nama DPO Pembunuhan Vina yang Sudah Diputus Pengadilan? ", Kompas.com, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/28/190000965/bolehkah-polisi-hapus-2-nama-dpo-pembunuhan-vina-yang-sudah-diputus?page=all>, , tanggal akses 16 September 2024.

H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 16 September 2024.

Hendra Ong, “Pengertian DPO dan Dasar Hukumnya”, Pengacara Handal, diakses melalui www.pengacarahandal.com, diakses tanggal 02 Maret 2025.

Ifan Jafar Siddik, “Semakin Mudah, Cara Cek Status DPO, Bisa Diakses Lewat Dukcapil”, INews TTU, diakses melalui <https://ttu.inews.id/read/132207/semakin-mudah-cara-cek-status-dpo-bisa-diakses-lewat-dukcapi>, tanggal akses 16 September 2024.

Kristian Adianto, “Penyidik KPK Dinilai Bisa Tetapkan Status DPO Setya Novanto”, Nasional Kompas.Com, diakses melalui www.nasional.kompas.com, diakses 02 Maret 2025.

- Lalola Easter, "DPO Tidak Boleh Ajukan Pra-Peradilan dan PK", Republik Merdeka Rmlo.co (online), <http://www.rmlo.co/read//DPO-Tidak-Boleh-Ajukan-Pra-Peradilan-Dan-PK->, dikunjungi pada tanggal 02 Maret 2025.
- Leopold Hutagalung, "Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia". Institute Criminal Justice Reform, diakses melalui <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia>, diakses tanggal 18 September 2024.
- Litbang Suara Cianjur, "Pengertian DPO Sesuai Peraturan Kapolri, Proses Penetapan dan Penghapusan Status DPO", Suara Cianjur, diakses melalui <https://www.suaracianjur.com/2024/11/pengertian-dpo-sesuai-peraturan-kapolri.html>, tanggal akses 27 Maret 2025.
- Suhadi, "Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO", Hukum Online.com, diakses melalui www.hukumonline.com, 3 April 2018, diakses pada 02 Maret 2025.
- Suhadi, "Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka", Hukum Online.com, diakses melalui www.hukumonline.com, diakses tanggal 27 Februari 2025.
- Tribun Medan.Com, "KPK Bisa Terbitkan Penetapan Status DPO Terhadap Tersangka Setya Novanto", melalui www.medan.tribunnews.com, diakses 27 Februari 2025.
- Zulham A Mubarrok, "Buron", Petisi.com, diakses melalui <https://petisi.co/buron>, diakses 03 Maret 2025.